**PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM
PERKEMBANGAN APLIKASI MUSIK *STREAMING*
(*The Role of National Collective Management Institutions
in The Rise of Music Streaming Applications*)**

Antonio Rajoli Ginting
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan 12980 Jakarta Selatan
Tel.: 021-2525015/ 081284277833
antonioginting64@gmail.com

Tulisan Diterima: 06-09-2019; Direvisi: 11-10-2019; Disetujui Diterbitkan:12-11-2019

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.379-398>

ABSTRAK

Sebuah lagu merupakan bagian dari karya seni yang dilindungi hak ciptanya. Apabila lagu tersebut dipakai untuk tujuan komersil maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait berhak mendapatkan hak ekonominya berupa royalti. Dalam konteks perkembangan dunia yang serba digital, perlindungan hak ekonomi menghadapi tantangan yang besar. Digitalisasi semakin memudahkan masyarakat untuk menikmati lagu dimanapun menggunakan aplikasi musik *streaming*. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan royalti musik pada aplikasi musik *streaming* dan bagaimana upaya LMKN dalam mengelola royalti pada aplikasi musik *streaming*. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Mekanisme pengelolaan royalti pada aplikasi musik *streaming* dengan cara memberikan royalti untuk lagu yang *distreaming* oleh pengguna. Royalti diberikan melalui Lembaga Manajemen Kolektif yang kemudian meneruskannya kepada pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengelola royalti dari aplikasi musik *streaming* adalah dengan memperbaiki database musik yang ada di Indonesia, kemudian menentukan tarif yang sesuai untuk sebuah royalti dari lagu yang diputarkan pada aplikasi musik *streaming*. Adapun saran dari penulis adalah segera membuat aturan yang tepat untuk pengumpulan royalti di aplikasi musik *streaming* dan alur pengumpulan yang jelas dari aplikasi musik *streaming* ke pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.

Kata kunci: LMKN; royalti; aplikasi musik *streaming*

ABSTRACT

Music as part of arts has copyrights that should be protected. In case of commercial purposes, the song's creator, copyright holder and the owner of related rights has an economic rights in the forms of royalty. The rising of digitalization has facilitated people need to enjoy music everywhere and every time through digital music streaming apps. However, in the other hand this technology has put economic rights in the jeopardy. This paper would like to examine the mechanism of royalty management and the role of LMKN on managing royalty in digital music streaming. This paper uses a qualitative method with descriptive data analysis. Based on a study on the practice of royalty management, royalty is given for every song played in digital music apps. Music streaming Apps distribute royalty indirectly through Collective Management Institution (Lembaga Manajemen Kolektif/ LMK). Afterward, LMK will forward the royalty to the rightsholders. Nation Collective Management Institution (LMKN) attempted to take a bigger role in the royalty management by repairing Indonesia

Music Database and establishing minimum tariff that guarantees musician' need. In the end of the paper, I offer recommendation about the way royalty should be collected and what kind of regulation should be conducted in order to collect royalty from various digital music apps.

Keywords : LMKN; royalty; digital music streaming apps

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks merupakan sebuah karya seni yang dilindungi hak ciptanya. Berbeda dengan karya seni lain, unsur hak cipta dalam sebuah lagu lebih kompleks. Dalam sebuah lagu terdapat beberapa unsur yaitu lirik, musik dan aransemen. Masing-masing diciptakan, direkam dan ditampilkan oleh subjek yang berbeda yaitu penyanyi, manajemen artis, studio rekaman, serta label musik. Masing-masing subjek tersebut dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diklasifikasikan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait. Pencipta adalah pihak yang menghasilkan ciptaan, dalam konteks ini pencipta musik, lirik maupun aransemen. Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk setiap karya yang digandakan maupun dipertunjukkan ulang. Pemegang Hak Cipta merupakan pihak yang menerima seluruh hak dari Pencipta secara sah, misalnya ahli waris. Pemegang Hak Terkait adalah mereka yang memegang hak terkait suatu ciptaan misalnya penyanyi atau musisi yang mempertunjukkan ciptaan, produser fonogram dan lembaga penyiaran. Sehingga, ketika sebuah lagu dipertunjukkan, maka yang mendapatkan hak ekonomi berupa royalti tidak hanya Pencipta tapi juga penyanyi, pemilik label rekaman dan produser fonogram. Masing-masing memiliki porsinya masing-masing sesuai dengan yang disepakati.

Perkembangan dunia digital saat ini semakin memberi ruang untuk sebuah lagu/ musik dapat didengar dengan mudah setiap saat. Lahirnya aplikasi musik *streaming*

seperti *Spotify* membuat orang dapat lebih mendengarkan lagu yang disukainya. Menurut data yang dilansir Kompas, pendapatan industri musik dari platform musik *streaming* pada 2017 telah mencapai 43% dari total pendapatan industri musik secara keseluruhan. Secara spesifik, pertumbuhan musik *streaming* mencapai 39 persen per tahun, naik 2,1 milyar hingga mencapai 7,4 miliar dollar AS (sekitar Rp 130 triliun). Capaian tersebut terus meningkat hingga melebihi total pendapatan format lama, yakni kepingan CD dan unduhan.¹ Di satu sisi, hal ini semakin mempermudah musisi dalam mengenalkan dan memasarkan karyanya, namun di sisi lain distribusi royalti Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait menjadi lebih rumit. Wikstrom dalam Norgard menyebut fenomena ini sebagai "*increasing amateur activities*" dimana setiap orang dapat menciptakan karya dan dipublikasikan tanpa perlu bergabung dalam label rekaman. Perkembangan ini baik jika dilihat dari perspektif pencinta seni, namun berbahaya jika tidak diimbangi dengan pengaturan royalti yang jelas.

Royalti memegang peran yang luar biasa dalam industri musik. Hal ini diungkapkan oleh Frith dan Marshall dalam Norgard yang menyebut bahwa inti dari industri musik terletak pada royalti.

"For anyone with any interest in music, copyright is vitally important, more important than any other concept in

1 Kompas, "Layanan 'Musik Streaming' Sumbang 43 Persen Pendapatan Industri Musik," last modified 2018, <https://tekno.kompas.com/read/2018/04/25/12005617/layanan-music-streaming-sumbang-43-persen-pendapatan-industri-musik?page=all>.

making sense of the variety of social practices that make up 'the music industry'. Copyright provides the framework for every business decision in the industry. (. . .) Copyright, one might say, is the currency in which all sectors of the industry trade."

Daniel Nordgard menyebutkan sebelum era digitalisasi, permasalahan royalti musik telah mengemuka, misalnya adanya pembajakan CD musik atau perekaman ulang kaset musik oleh individu yang kemudian diperjualbelikan. Namun, pembajakan yang terjadi saat di era produk fisik masih terbatas karena kendala teknis seperti kualitas suara yang buruk atau resolusi gambar yang tidak sebaik versi original. Menell menyebut adanya produk fisik ini sebagai *Technological Protection Measures* atau secara harfiah bisa diterjemahkan sebagai batasan proteksi teknologi. Semenjak era digital, pembajakan menjadi hal yang lumrah dan dilakukan hampir semua orang. Banyak situs yang menyediakan layanan *download* lagu dari *Youtube*, misalnya. Permasalahannya menjadi pelik menurut Levine karena masyarakat mulai berpikir musik adalah barang publik yang dapat dinikmati secara bebas alias gratis. Mereka berpotensi menjadi *Free Riding* atau orang yang diuntungkan dari hasil karya orang lain.

Dengan kata lain, adanya produk yang berbentuk fisik seperti kaset atau CD justru membatasi peluang pembajakan karena kualitasnya tidak akan sebaik kaset atau CD *original*. Konsumen cenderung memilih produk *original* karena mempertimbangkan kualitas produk. Sementara, ketika produk musik beralih ke versi digital, kualitas produk bajakan akan sama dengan produk *original*. Konsumen pun tidak lagi meragukan produk bajakan karena kualitas sama dengan biaya yang jauh lebih murah atau bahkan gratis. Sehingga, satu-satunya hal yang bisa membatasi konsumen dari keinginan membeli produk bajakan hanyalah hukum

yang kuat. Oleh karenanya butuh dasar hukum serta peraturan mengenai mekanisme perlindungan hak cipta di era digital terutama dalam hal musik. Berbeda dengan karya seni lain, Heller dalam Norgard berpendapat musik memiliki hak cipta yang kompleks karena keragaman unsur di dalamnya.

Terkait dengan penegakan hukum, harus diakui bahwa lemahnya penegakan hukum dan maraknya pembajakan di Indonesia sempat memberi nama yang kurang sedap bagi Indonesia "surga para pembajak". Pembajakan KI di Indonesia sudah pada tingkat yang membahayakan dan merugikan perekonomian nasional. Dengan maraknya pembajakan pendapatan negara dari sektor perpajakan menurun. Selain itu, masalah pelanggaran KI juga akan berpengaruh terhadap gairah atau keinginan untuk berkreasi dan berinovasi terhadap karya-karya intelektual guna pengembangan teknologi dan industri melalui Pencipta produk-produk baru.²

Dikutip dalam laman lmkn.id sejarah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dimulai dari Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mengamanahkan didirikannya LMKN (untuk Menangani pengumpulan royalti musik di Indonesia. Pada tanggal 20 Januari 2015, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Hak Terkait. Masa jabatan Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tugas Komisioner LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait yakni menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti, penetapan

2 Taufik H Simatupang, "Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Ki Di Indonesia" 10 (2016).

tata cara pendistribusian royalti, dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Kehadiran LMKN di bidang musik diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait.

Dalam berita di hukumonline.com, Menteri Hukum dan HAM Yasona mengatakan bahwa hampir semua negara telah memiliki mekanisme pemberian royalti permusikan melalui media sosial dan aplikasi yang telah diatur dengan jelas. Sementara, Indonesia masih memakai Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang belum menyebutkan secara spesifik pengaturan *platform* digital. Saat ini telah ada wacana pembentukan regulasi penarikan royalti melalui media sosial dan aplikasi, serta dari luar negeri. Hal ini mendesak untuk dilakukan mengingat potensi royalti musik Indonesia yang berada di luar negeri mencapai Rp 3 triliun. Saat ini, dana tersebut tidak dapat ditarik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dikarenakan belum adanya *database* musik yang lengkap.³

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Pasal 1 menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah *non* APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang berhak menarik royalti adalah LMKN.

Sebelum peraturan ini diterbitkan, penarikan royalti dan pendistribusian royalti

pada lagu dan/atau musik yang digunakan untuk kepentingan bisnis dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada pelaksanaan Deklarasi Bali, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan 8 (delapan) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, dan SMI menyepakati pemungutan royalti musik sistem satu pintu.⁴

Melalui Deklarasi Bali ini, disepakati bahwa LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial. Penarikan royalti sistem satu pintu ini merupakan langkah awal perwujudan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil, dan efisien.⁵ Dengan adanya kesepakatan ini maka perlunya LMKN mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti agar dapat memastikan hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini berargumen bahwa LMKN membutuhkan dasar hukum yang kuat untuk menjangkau potensi royalti yang cukup besar pada aplikasi musik *streaming*. Regulasi yang dimaksud harus menunjukkan peran LMKN sebagai Lembaga satu-satunya yang mengumpulkan royalti, berbeda dengan praktik saat ini dimana royalti dikumpulkan oleh tiap LMK.

3 Fitri Novia Heriani, "Aplikasi Penyedia Musik Sejenis JOOX, iTunes Siap-Siap Kena Royalti," *Hukum Online*.

4 "Deklarasi Bali" Sepakati Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu Jadi Lebih Tertib Dan Transparan," *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*.

5 Ibid.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas maka dalam pengkajian ini akan diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan royalti musik pada aplikasi musik *streaming*?
2. Bagaimana upaya LMKN dalam mengelola royalti pada aplikasi musik *streaming*?

Tujuan

Tujuan dari pengkajian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pengelolaan royalti musik pada aplikasi musik *streaming*.
2. Untuk mendeskripsikan upaya LMKN dalam mengelola royalti pada aplikasi musik *streaming*.

Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena aplikasi musik *streaming* yang sedang diteliti.

2. Sifat

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang berlaku mengenai pengelolaan hak cipta berupa royalti menggambarkan kondisi yang sebenarnya sekaligus melakukan analisis atas temuan data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan

yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif; bahan hukum sekunder berupa buku, hasil-hasil penelitian dan internet yang berhubungan dengan pokok masalah; maupun bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶

4. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan Royalti Musik pada Aplikasi Musik *Streaming*

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait.⁷ Bernard (dalam Syifa, 2018:721) menjelaskan bahwa secara umum, royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk terkait kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-

6 Soerjono; Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

7 "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," n.d.

ukuran tertentu dan kemudia dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.⁸

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki keterbatasan untuk menjadikan ciptaannya menjadi uang. Pencipta membutuhkan peran pihak lain, dan untuk itu Pencipta akan mengalihkan semua atau sebagian hak-hak ekonominya kepada pihak lain. Dikaitkan dengan pengalihan hak-hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta muncul apa yang disebut dengan lisensi.⁹ Dalam sebuah karya seni berupa lagu, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dapat memberikan lisensi kepada sebuah label musik untuk mempromosikan lagu atau musik ciptaannya.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.¹⁰

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak

Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹¹

Adanya Hak khusus dalam hak cipta yaitu diantaranya hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan lagu, seperti tertera dalam pasal 9 Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini para Pencipta lagu mempunyai diantaranya dua macam hak atas lagu ciptaannya tersebut yaitu:

- a. Hak mengumumkan

Hak ini meliputi penyiaran, penyuaran dan pertunjukan agar dapat didengar dan disaksikan oleh orang lain. Hal ini seringkali disebutkan sebagai hak untuk pertunjukan (*performing right*).

- b. Hak memperbanyak

Hak ini merupakan hak pengadaan dengan jalan merekam dalam bentuk *cassette*, piringan hitam, *compact disc*, buku-buku, film. Hal ini lazim disebut dengan istilah *mechanical right*.¹²

Aplikasi Musik *Streaming* adalah suatu terobosan baru untuk dunia musik saat ini. Beberapa contoh aplikasi digital musik *streaming* ini adalah *Spotify* dan *Joox*. Para pendengar musik terutama dari kalangan milenial lebih suka mendengarkan musik lewat aplikasi digital musik *streaming* tersebut. Kemudahan akses musik yang ditawarkan semakin cocok untuk generasi yang aktif dan dinamis ini. Dengan mengunduh aplikasi lewat *smartphone* maka para pendengar dapat menikmati musik yang diinginkan dari berbagai genre tanpa harus membeli puluhan kaset atau CD dengan harga yang jauh lebih mahal.

Sebagai generasi usia produktif yang aktif menggunakan perangkat teknologi, generasi milenial memiliki beberapa karakter

8 Syifa Ananda, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke" 1 (2018): 713–731.

9 Ibid.

10 Dalam Perspektif and H A K Asasi, "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (" 1, no. 3 (2019): 69–84.

11 Ibid.

12 Agus Dimiyati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke" (n.d.): 30–43.

pada saat mencari dan mengakses layanan music *streaming* di internet. Hal ini dapat dilihat pada riset dari Digital McKinsey, tentang The Beat of Progress: The Rise of Music *Streaming* in Asia, menjelaskan bahwa generasi milenial lebih menyukai tiga hal. Pertama lokalisasi, penyedia layanan musik *streaming* sebaiknya menyediakan konten lokal sehingga lebih relevan bagi pengguna lokal yang mengakses layanan tersebut. Misalnya bahasa Indonesia, atau artis lokal Indonesia. Kedua, personalisasi, penyedia layanan sebaiknya menyediakan konten musik berdasarkan kesukaan dan preferensi pengguna sehingga lebih personal sifatnya. Dengan demikian akan membuat lebih eksklusif. Misalnya fitur “*Your Daily Music*” dari *Spotify*. Ketiga, ramah media sosial, penyedia layanan sebaiknya berkolaborasi dengan media sosial yang ada sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses layanan musik *streaming* tersebut. Misalnya *login* menggunakan identitas sosial media yang sudah ada.¹³

Menurut Gobry (dalam Netti: 2018) *Spotify* memiliki model bisnis campuran antara layanan *freemium* yang didukung oleh iklan, dan layanan berbayar. Dalam menjalankan bisnis modelnya, komponen biaya terbesar adalah biaya penjualan, termasuk di dalamnya biaya untuk pembayaran lisensi musik. Selain layanan berbayar, *Spotify* juga menggabungkannya dengan layanan *freemium* yang didukung oleh layanan periklanan. Ada tiga model berlangganan yang dijelaskan di laman *Spotify.com*, yaitu:

1. *Spotify* Gratis. Pengguna aplikasi dapat mengunduh dan mendengarkan *Spotify* secara gratis, dan sebagai gantinya, terdapat layanan periklanan berupa audio dan iklan display.
 2. *Spotify* Premium. Membayar biaya berlangganan sebesar Rp. 49,900,-/ bulan (untuk umum), Rp. 24,900,- (untuk pelajar), dan Rp. 79,000,- untuk keluarga, dan mendapatkan lima account.¹⁴
- Aplikasi musik *streaming* pada pengguna yang tidak berbayar, menyelingkan iklan di setiap lagu yang diputar pengguna. Untuk memberikan beragam layanan periklanan berbasis audio yang eksklusif kepada pengiklan di Indonesia, maka *Spotify For Brands* menghadirkan sepuluh ad format eksklusif di aplikasi *Spotify non premium*. Berikut ini adalah ad format dari *Spotify For Brands*, seperti yang disebutkan di laman *SpotifyForBrands.com*:
1. *Branded Moments*. Untuk membangun kedekatan merek dan menciptakan nilai lebih bagi audiens dengan cara beresonansi, memanfaatkan kecerdasan *streaming Spotify*, dan memberi kesempatan kepada brand untuk terlibat dengan pendengar di saat yang pas.
 2. *Sponsored Playlist*. Memungkinkan untuk memaksimalkan kesadaran akan merek dengan mensponsori *playlist Spotify* secara eksklusif. Pengiklan akan terhubung dengan pendengar di *playlist* favoritnya.
 3. *Sponsored Session*. Menjadi pintu gerbang menuju pengalaman musik *streaming* bagi pendengar *Spotify* versi gratis untuk mendengarkan musik tanpa iklan selama 30 menit. Sebagai imbalannya, maka pendengar akan menonton video eksklusif pengiklan.
 4. *Video Takeover Everywhere*. Memberikan layanan iklan video untuk pendengar di perangkat *mobile* dan *desktop*. Video dijamin *Human Audible* dan *Visible on Complete* yang diukur oleh MOAT.
 5. *Audio*. Mengjangkau target audience di semua perangkat dari pendengar, di semua tempat, kapan saja, iklan akan

13 S Yollis Michdon Netti and Irwansyah Irwansyah,

“*Spotify: Aplikasi Music Streaming Untuk Generasi Milenial*,” *Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2018): 1.

14 Ibid.

ditampilkan di antara jeda lagu sehingga lebih efektif.

6. *Homepage Takeover*. Layanan ini akan menampilkan brand pengiklan secara menarik ketika pendengar mengakses aplikasi *Spotify*. Format ini hanya untuk pendengar yang menggunakan fasilitas *edsktop*.
7. *Overlay*. Jenis iklan yang sangat kelihatan dan muncul saat pendengar kembali ke halaman utama *Spotify*. Untuk pendengar yang menggunakan fasilitas *desktop* dan perangkat mobile.
8. *Leaderboard*. Menggunakan *standard IAB (Interactive Advertising Bureau) banner*, dan tampil selama 30 detik. Iklan dapat diklik menuju ke *website* pengiklan.
9. *Branded Playlist*. Sangat efektif untuk membangun brand pengiklan di *playlist Spotify*, dengan menyajikan daftar lagu yang sesuai dengan minat pendengar.
10. *Advertise Page*. Memungkinkan *Spotify* untuk mengintegrasikan merek pengiklan di aplikasi *Spotify* secara menarik. Dapat menampilkan konten pengiklan, blog, berita, hingga video.

Di Indonesia, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet dari generasi milenial adalah sebesar 63% dari total pengguna internet di Indonesia yaitu 132,7 juta orang. Mereka mendengarkan musik secara online (35,5%), dan menggunakan perangkat mobile sebagai sarana berkomunikasi (47,6%). (APJII, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa mendengarkan musik secara online adalah sebuah cara generasi milenial mendapatkan hiburan.¹⁵ Dengan adanya data ini terlihat bahwa banyaknya royalti yang dapat dikumpulkan dan disalurkan melalui aplikasi musik *streaming*.

Menurut Koerbel dalam Netti: 2018 menjelaskan tentang banyaknya karakter dari generasi milenial ketika mendengarkan musik. Latar belakang budaya dan tingkat pendidikan sangat memengaruhi hal ini. Pada sebuah penelitian terdahulu tentang *Millennial Music Discovery*, menggambarkan dengan jelas tiga karakter dari generasi milenial ketika mengkonsumsi layanan musik *streaming*, yaitu:

1. *Routinists*. "*Play me my favorites*". Tipe ini mendengarkan musik setiap hari, namun tidak menyediakan waktu secara khusus untuk menemukan musik terbaru. Hanya mendengarkan musik sesuai suasana hati, dan tak ingin mengetahui lebih selain lagu yang didengarkan. Pendengar musik seperti ini memiliki interaksi yang rendah, lebih memilih layanan gratis, dan daya beli yang rendah.
2. *Backtorians*. "*Hungry for information about artists*". Mereka menggunakan banyak *platform* saat mengakses layanan musik yang disukai. Ingin belajar banyak hal tentang artis favoritnya menggunakan media sosial yang ada. Memiliki selera musik yang lebih baik dari orang kebanyakan. Pendengar tipe ini hanya menyukai genre musik tertentu saja, daya beli yang baik, memiliki referensi informasi yang bagus.
3. *Songsmiths*. "*Seeking meaning and connection*". Sangat aktif untuk menemukan lagu-lagu terbaru, menyukai sebuah lagu berdasarkan musik dan liriknya, lebih suka berinteraksi dengan langsung dengan artis melalui platform musik daripada sosial media. Tertarik untuk untuk menemukan musik yang memiliki makna mendalam bagi dirinya. Tipe ini menyukai banyak genre musik, memiliki pemikiran yang bebas, mencari informasi musik dari berbagai sumber.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Melihat karakter generasi milenial diatas, maka dapat dipastikan aplikasi musik *streaming* akan sering digunakan. Hal ini dapat menjadi potensi royalti yang akan dikumpulkan menjadi lebih banyak lagi. Terlepas dari banyaknya aplikasi musik *streaming*, sehingga perlu kiranya bermusyawarah untuk menentukan tarif yang tepat dalam pengumpulan royalti sehingga dapat disalurkan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Spotify merupakan aplikasi yang menyediakan layanan personal dengan fitur sosial dan interaktif untuk *streaming* musik dan konten lain, serta produk dan layanan lain yang dapat dikembangkan dari waktu ke waktu. Untuk dapat menggunakan layanan *Spotify* dan mengakses konten, maka pengguna harus: (1) memenuhi persyaratan usia yakni harus berusia 21 tahun atau lebih tua, atau berusia 13 tahun atau lebih tua dan mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali; (2) memiliki kuasa untuk mengadakan kontrak mengikat dengan *Spotify* dan tidak dilarang untuk melakukannya berdasarkan hukum yang berlaku; dan (3) berdomisili di negara tempat layanan tersedia.¹⁷

Selain mengatur interaksinya dengan pengguna, *Spotify* juga mengatur interaksinya dengan musisi terutama dalam hal pembayaran royalti. Dalam situs resmi *Spotify*, ada dua tipe royalti yang dibayarkan yakni:

1. Royalti Rekaman (*Recording Royalties*): dimana royalti yang diterima dari setiap pemutaran di *spotify*, dibayarkan kepada artis melalui pemberi lisensi yang mengirimkan musik tersebut, biasanya label rekaman atau distributor mereka.
2. Royalti Penerbit: dimana uang/royalti untuk penulis lagu atau pemilik komposisi. Pembayaran diberikan kepada penerbit, LMK (*collecting societies*), dan agensi yang berada sesuai wilayah pengguna.

¹⁷ Spotify, "Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Spotify."

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bagaimana *Spotify* membayarkan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait. Setiap lagu yang diputar oleh pelanggan, maka *Spotify* akan mengkalkulasinya dan memberikannya kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait melalui mekanisme diatas. Tetapi dalam situs resminya tidak dijelaskan secara detail berapa besaran royalti yang dihasilkan setiap *streaming* musik oleh pengguna.

Spotify memberikan royalti kepada musisi sebesar 0,006 dolar AS hingga 0,0084 dolar AS untuk sekali *streaming*. Apabila lagu tersebut milik penyanyi ternama, maka tentunya semakin banyak pula uang yang didapatkan.¹⁸ Meski dalam websitenya *Spotify* menyatakan pembayaran royalti tidak dihitung per *streaming*, namun faktanya banyaknya jumlah pemutaran (*pay per stream/ pps*) sangat mempengaruhi nominal royalti yang dibayarkan di luar faktor popularitas artis dan pendapatan per kapita daerah dimana lagu diputar.

Belajar dari pengalaman *Spotify*, terdapat tiga permasalahan yang dialami platform digital dalam membayarkan royalti. Pertama, pembayaran royalti dengan cara menghitung jumlah *streaming* seperti ini dapat menimbulkan masalah karena tidak adanya data yang jelas tentang berapa jumlah *streaming* sebuah lagu tersebut. Dari praktik ini perlu adanya Lembaga yang mengawasi/ meverifikasi dan memastikan bahwa jumlah *streaming* yang disajikan adalah benar adanya. Dalam hal ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dapat berperan untuk mengawasi pengumpulan royalti tersebut.

Dalam hal mekanisme pembayaran royalti untuk musisi, *platform* digital seperti *Spotify* masih memiliki kekurangan yang

¹⁸ Cekaja.com, "Intip Cara Baru Musisi Mendownload Duit Di Era Digital," <https://www.cekaja.com/kartu-kredit/news/137980-intip-cara-baru-musisi-mendownload-duit-di-era-digital.html>.

ujungnya merugikan musisi. Pada 2015 *Spotify* harus menghadapi gugatan *class action* senilai USD150 juta atas royalti yang belum dibayarkan.¹⁹ Dalam industri musik umumnya informasi tersebar di *proprietary databases, spreadsheets, email inboxes*, dan kontrak berjangka panjang yang dikelola oleh organisasi yang terpisah. *Database* ini belum dimiliki Indonesia meski prototipenya sedang dibangun oleh Bekraf bernama Portamento. Keberadaan *database* penting mengingat seringkali terjadi perubahan penerima hak royalti akibat lepasnya artis dari sebuah label rekaman, atau pergantian personel grup musik. Ini mengakibatkan hak layanan musik tidak bisa mengidentifikasi siapa pemilik hak cipta, bagaimana pembagiannya dan berapa harga lisensinya. Walaupun data itu ada, pembagian porsi lisensi seringkali berubah karena kontrak habis dan tidak ada yang tahu pasti. Sebenarnya data kepemilikan tersebut bisa saja ditempelkan/ dilekatkan dengan file musiknya, tapi ada kemungkinan besar data tidak terstandarisasi, atau hilang, atau tidak akurat sehingga sulit untuk dilacak.

Permasalahan kedua berkaitan dengan tidak adanya payung hukum yang mengatur tarif minimum royalti. *Spotify* misalnya, memberikan harga kira-kira USD 0,006 tiap pemutaran lagu yang diambil dari biaya langganan. Sehingga, jika dikalkulasi untuk musik yang diputarkan 1 juta kali, pemegang hak hanya mendapatkan royalti sebesar USD 6,000 atau setara dengan Rp 85 juta rupiah dimana jumlah ini masih harus dibagi antara produser rekaman, artis, penulis lagu dan komposer. Belum adanya payung hukum Indonesia yang mengatur mengenai tarif minimal pembayaran berpotensi membuat musisi Indonesia mendapatkan bayaran royalti yang lebih rendah.

Peraturan yang ada saat ini baru mengatur tarif royalti di beberapa tempat yakni dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu. Peraturan tersebut mengatur tarif royalti pada:

1. Seminar dan Konferensi Komersial
2. Restoran, Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam dan Diskotek
3. Konser Musik
4. Pesawat Udara, Bus, Kereta Api dan Kapal Laut
5. Pameran dan Bazar
6. Bioskop
7. Nada Tunggu Telepon, Bank dan Kantor
8. Pertokoan
9. Pusat Rekreasi
10. Lembaga Penyiaran Televisi
11. Lembaga Penyiaran Radio
12. Hotel dan Fasilitas Hotel²⁰

Permasalahan ketiga berkaitan dengan mekanisme pembayaran royalti yang belum satu pintu. Sampai Juli 2019 *Spotify* misalnya masih mempersilakan musisi Indie mengunggah langsung musik mereka dalam aplikasi dan dapat secara otomatis dinikmati oleh pengguna musik. Fitur ini meski memudahkan bagi musisi Indie namun kian mempersulit pengawasan pembayaran royalti. Idealnya *Spotify* akan membayarkan kedua jenis royalti melalui distributor, label rekaman maupun LMK tempat dimana musisi terdaftar. Tanpa melalui label atau distributor, *Spotify* akan kesulitan melacak pemilik hak cipta; menentukan tarif dan melakukan pembayaran. Meski begitu, pada Juli lalu,

19 Dini Listiyani, "Pecahkan Masalah Royalti, Spotify Pinang Startup Mediachain," *Okzone.Com*.

20 "Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu," n.d.

Spotify menyatakan sedang berusaha menyiapkan *tool* khusus untuk musisi indie mengunggah karya mereka dengan beberapa persyaratan khusus.²¹ Dampaknya apabila *spotify* membuat *tools* sendiri maka peran LMK tidak lagi dapat menjangkau para musisi indie. *Database* mereka juga bakal tidak ditemukan di anggota LMK.

Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Mengelola Royalti pada Aplikasi Musik *Streaming*

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan Lembaga bantu pemerintah *non* APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik. Dalam suatu karya musik/lagu terdapat Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau Lembaga penyiaran.²²

Dalam sebuah lagu atau musik dengan atau tanpa teks dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta) sekalipun terdiri dari atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan

aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta.²³ Jadi yang dikatakan sebagai Pencipta lagu adalah seluruhnya mulai dari penulis lagu hingga pembuat melodi. Pemegang Hak Cipta lagu bisa saja bukan Pencipta lagu karena dalam peraturannya pencipta dapat menyerahkan hak ciptanya kepada seseorang. Hak Terkait dalam sebuah lagu adalah mulai dari label musik sampai ke studio rekaman dimana lagu tersebut direkam.

Sadikin dalam Monika menjelaskan bahwa Hak terkait secara internasional dikenal sebagai *neighboring rights*, *rights related to*, atau *neighboring on copyright*. Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 hak yaitu:

1. *the arts of performing artists in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya);
2. *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut); dan
3. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan television).²⁴

Muhammad Ahkam dalam Mirwansyah: 2014 menyatakan dalam menentukan “nilai” dari suatu karya cipta maka faktor nilai ekonomis yang perlu diperhatikan. Usia Hak Cipta untuk sebuah karya lagu adalah 50 tahun, sedangkan usia ekonomisnya tergantung dari kualitas dari lagu tersebut. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan hasil karya tersebut dapat pula memberikan kesejahteraan bagi penciptanya. Husain Audah dalam Mirwansyah: 2014

21 Athika Rahma, “Spotify Tak Lagi Izinkan Musisi Indie Upload Musik Secara Langsung,” *Liputan6.Com*.

22 “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Nomor 36 TH 2018.Pdf,” 2018.

23 M.H. Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

24 Monika Suhayati, “Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28,” no. 28 (2014): 207–222.

mengungkapkan di dalam Hak Cipta karya musik dan lagu biasanya terjadi pemisahan antara:

1. Pemilik Hak Cipta (Pencipta), yaitu seorang Pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya yang berarti pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan Pemegang Hak Cipta;
2. Pemegang Hak Cipta (*publisher*), yaitu melekat pada penciptanya atau diserahkan kepada penerbit musik. Penerbit musik (*music publishing*) yang mendapat pengalihan hak sebagai Pemegang Hak Cipta mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya;
3. Pengguna Hak Cipta (*users*), yaitu untuk hak memperbanyak *user* adalah pengusaha rekaman, hak mengumumkan *user* adalah badan yang menggunakan karya musik atau lagu untuk keperluan komersial (hotel, restoran, karaoke dll), untuk *printing rights user* adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik melodi lagu maupun liriknya untuk keperluan komersial.²⁵

Ada beberapa cara untuk pembayaran lisensi selain royalti, yaitu:

1. Pembayaran sekaligus (*lump-sum*)
Dalam perjanjian lisensi, pembayaran dapat dilakukan sekaligus, biasanya dilakukan pada saat menandatangani perjanjian lisensi. Pada seorang *licensor*, pembayaran dengan cara ini mempunyai beberapa keuntungan.
 - *Licensor* tahu pasti berapa yang didapatnya dan tidak bergantung pada persentase omzet *licensee* yang belum pasti.

- Jelas telah ada pembayaran, jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan diantara mereka, akan lebih baik telah menerima daripada akan menerima.

2. Pembayaran untuk tiap kesatuan yang disebut dalam kontrak

Pembayaran dengan cara ini dilakukan berdasarkan jumlah produksi lisensi tersebut, seperti permesin, dan perkaset, serta untuk kesatuan-kesatuan ini diperjanjikan satu jumlah tertentu yang harus dibayar. Pembayaran dengan cara ini betapapun sederhana dan jelasnya, mempunyai segi-segi kurang menguntungkan bagi pemberi lisensi jika ada kenaikan harga disebabkan karena faktor-faktor tertentu, misalnya inflasi.

3. Pembayaran berdasarkan persentase keuntungan

Pembayaran dengan cara ini dinyatakan dengan suatu persentase dari keuntungan yang didapat *licensee* dari obyek yang dilisensikan. Tetapi apakah keuntungan dan bagaimana bila tidak ada keuntungan, kepada siapakah dibebankan kepada *licensor* atau *licensee*. Terlihat bahwa bentuk ini kurang menarik walaupun ada juga orang yang menggunakannya.

4. Royalti

Pembayaran dengan cara royalti adalah pembayaran berdasarkan suatu persentase dari harga jual atau harga ongkos obyek yang diberi lisensi itu atau produksi-produksi yang dihasilkan dengan obyek lisensi. Dibandingkan dengan pembayaran sekaligus, dapat dikatakan bahwa royalti lebih menguntungkan apabila lisensi itu mendapat sukses dan orang yang berkewajiban membayar royalti tersebut bersedia untuk mengadakan perjanjian yang cukup lama, sehingga jumlah yang akan diterima dari royalti keseluruhannya

25 Oleh Mirwansyah, "Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (2014).

akan lebih besar daripada jumlah pembayaran sekaligus.²⁶

Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, LMKN mempunyai tugas:

- a. Menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti di bidang lagu dan/atau musik
- b. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik
- c. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran ketetapan peraturan yang dilakukan oleh pengurus LMK
- e. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya
- f. Menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK
- g. Menerapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait
- h. Melakukan mediasi atas sengketa pendistribusian royalti oleh LMK apabila terdapat keberatan dan anggota LMK
- i. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

LMKN terdiri atas: LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait yang masing-masing dipimpin oleh komisioner yang bersifat independent. Keanggotaan komisioner LMKN Pencipta berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur:

- a. Pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan hak terkait
- b. Pencipta
- c. Akademisi dan/atau
- d. Ahli/pakar hukum di bidang hak cipta.

Sedangkan keanggotaan LMKN Pemilik Hak Terkait berjumlah ganjil, paling banyak 5 (lima) orang yang dapat berasal dari unsur:

- a. Pemerintah yang melakukan pengelolaan dan pengawasan di bidang hak cipta dan hak terkait
- b. Pencipta
- c. Akademisi dan/atau
- d. Ahli/pakar hukum di bidang hak cipta.

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Berdasarkan hal tersebut maka LMK juga diberikan kewenangan untuk menarik royalti dari pengguna yang memanfaatkan hak ekonomi suatu lagu. Dalam hal ini dapat menimbulkan pengumpulan royalti dari sebuah lagu oleh beberapa LMK apabila tidak ada pengaturan yang jelas mengenai batasan objek mana yang dapat dihimpun royaltinya oleh salah satu LMK.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, LMK harus memenuhi syarat untuk memperoleh izin operasional yakni:

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba

26 Binsar P. Sihotang, "Perlindungan Hak Ekonomi Produser Fonogram Terhadap Pembajakan Musik Dan Lagu-Lagu Asing Di Indonesia" (2014).

- b. Mendapatkan kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti
- c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK di bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili Hak Terkait dan/atau objek hak asasi lainnya
- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti, dan
- e. Mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Adapun dokumen persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yakni:

- a. Salinan akta pendirian
- b. Salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan Hukum
- c. Surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait
- d. Anggaran dasar LMK
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus LMK
- f. Daftar nama anggota LMK
- g. Daftar karya ciptaan dan/atau daftar produk Hak terkait yang dikelola oleh LMK
- h. Surat permintaan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Christina (dalam Syifa, 2018:721) menjelaskan bahwa fungsi LMK di bidang lagu atau musik adalah:

- 1. Posisinya adalah mewakili para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna lagu atau musik (user).

- 2. Kontribusinya adalah membantu Pencipta lagu atau musik mewujudkan hak-hak ekonominya dan memastikan supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandari lisensi pemakaian lagu atau musik.²⁷

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, dalam menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti, LMKN wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Selanjutnya Pasal 19 mengatakan setiap royalti yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 dihimpun direkening LMKN dan dapat diketahui oleh seluruh LMK.

Pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dilaksanakan melalui LMK yang diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang belum menjadi anggota LMK wajib menjadi anggota LMK untuk mendapatkan Royalti. Pendistribusian royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait diberikan sesuai dengan perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna. Pendistribusian royalti oleh LMK wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi: (a) jumlah besaran yang didistribusikan; (b) pihak yang menerima royalti.

27 Ananda, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke."

Dari peraturan tentang LMKN dan LMK terlihat jelas bahwa keduanya mempunyai wewenang yang sama dalam mengumpulkan royalti bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak terkait. Pendelegasian tugas dari LMKN ke LMK-LMK masih kurang jelas tentang siapa yang mengumpulkan royalti di sektor mana saja. Yang dapat di pastikan bahwa akan terjadi pengumpulan royalti secara ganda sehingga merugikan pengguna hak cipta secara komersil tersebut.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait untuk mendapatkan hak ekonominya harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada LMK, Sehingga LMK dapat menyalurkan royalti yang dikumpulkannya. Pada digital musik *streaming*, pihak *platform* mewajibkan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait untuk terdaftar di aplikasinya baru royalti yang didapatkan bisa disalurkan.

Pengaturan mengenai mekanisme pembayaran royalti ini berlaku tidak hanya di lingkup nasional namun juga internasional. Ini merupakan dampak dari *Bern Convention* dimana hak cipta sebuah karya seni dari sebuah negara anggota akan dilindungi oleh seluruh negara anggota. Indonesia yang telah meratifikasi *Bern Convention* pada 1997 pun dapat menerapkan prinsip yang sama. *Bern Convention* pertama kali ditulis pada 1886 lalu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Namun secara umum terdapat tiga prinsip yang mendasari *Bern Convention*. Pertama, prinsip *national treatment* yaitu ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga negara, negara peserta hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri. Kedua, *prinsip automatic protection* yaitu pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung

tanpa harus memenuhi syarat apapun (*must not be conditional upon compliance with any*

fonality). Ketiga, prinsip *independence of protection* yaitu suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta. Dengan begitu, musik Indonesia yang diputar di negara lain secara otomatis akan dilindungi oleh negara lain tersebut sepanjang dia merupakan negara anggota *Bern Convention*.

Keberadaan aplikasi musik digital membuat negara-negara makin menyadari pentingnya pengelolaan musik digital satu pintu. Salah satu negara yang dianggap menjadi pelopor mekanisme ini adalah Amerika Serikat dengan disahkannya *Music Modern Act* (MMA) oleh Kongres Amerika Serikat pada 11 Oktober 2018. Mengingat AS telah meratifikasi *Bern Convention*, pengesahan MMA ini mempengaruhi seluruh musik baik dari dalam maupun luar negeri yang diputar di dalam Amerika Serikat.

Perubahan signifikan dari MMA mengatur tentang 3 hal yaitu Pembaruan Lisensi Musik, pengaturan pada musik lawas dan adanya alokasi royalti untuk produsen musik. Dalam hal pembaruan, MMA mengatur tentang (1) bagaimana seseorang mendapatkan royalti dari perusahaan seperti *Spotify*, *iTunes*, *Amazon*, dll.; (2) Bagaimana uang royalti seseorang dapat diambil oleh perusahaan *music publisher* berdasarkan pembagian keuntungan; (3) Bagaimana layanan *streaming* digital mendapatkan lisensi dari karya komposisi seseorang; serta (4) Bagaimana pemerintah mengkalkulasikan tarif royalti dari tiap kali pemutaran.²⁸

Untuk melaksanakan ini, MMA mengatur tentang pembentukan sebuah komisi bernama MLC (*Mechanical Licensing Collective*) yang terdiri dari 14 orang dan bertugas untuk memastikan seluruh musisi dunia yang karyanya diputar di AS mendapatkan bayarnya. Pada prinsipnya,

28 How It et al., "The Music Modernization Act : " (n.d.).

MLC memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan LMKN. MLC bertugas untuk:

1. Mendapatkan informasi mengenai sebuah produk musik dan siapa yang berhak mendapatkan royalti atasnya.
2. Bertanggungjawab atas bayaran royalti terhadap produk musik tersebut
3. Memberikan lisensi pada layanan musik, sehingga bayaran dari layanan musik dapat diteruskan ke pemilik royalti musik²⁹

Dengan adanya MMA seluruh layanan musik yang bergabung dengan MMA tidak perlu berpikir keras tentang pada siapa mereka harus membayarkan royalti karena MLC telah mengatur itu semua. Pemilik royalti musik bisa memberikan lisensi langsung (DIRECT LICENCE) pada layanan musik. Jika kasusnya demikian, MLC tidak perlu lagi memberikan lisensi pada layanan musik, namun pihak layanan musik tetap harus membayar penalti pada MLC dan menginformasikan seberapa banyak musik tersebut diputar.

Untuk mendapatkan hak atas royalti, pemegang hak musik harus mendaftarkan dirinya pada MLC sehingga MLC tahu pada siapa dia harus meneruskan bayaran royalti dari layanan musik. Jadi jika sebelumnya Layanan Musik yang harus mencari siapa pemegang hak musik, kini sebaliknya, pemegang hak musik harus mendaftarkan diri di MLC agar bisa mendapatkan royaltinya.³⁰

Indonesia harus membuka diri terhadap perubahan yang terjadi di luar negeri. Indonesia harus mampu mengikuti upaya negara-negara lain yang tengah mengatur mekanisme pembayaran royalti satu pintu jika tidak mau musisinya kehilangan hak atas ciptaannya. Indonesia juga harus memanfaatkan posisinya sebagai anggota *Bern Convention*, sehingga kesempatan Indonesia untuk mendapatkan royalti

terutama bagi musik-musik lokal yang telah diputar di beberapa negara menjadi lebih besar lagi.

Praktik MLC di Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai rujukan. Ketiga fungsi MLC sama persis dengan fungsi LMKN di Indonesia yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai hak cipta sebuah musik, bertanggungjawab atas bayaran royalti dan memberikan lisensi pada layanan musik. Perbedaannya LMKN belum memiliki payung hukum dalam pengelolaan musik digital sebagaimana MLC dilindungi oleh MMA. Hal ini mengakibatkan LMKN tidak mampu mengatur empat hal yang telah diatur dalam MMA yaitu mengenai mekanisme musisi mendapatkan royalti; mekanisme pengumpulan royalti; mekanisme perolehan lisensi serta kalkulasi tarif.

Indonesia bukannya diam saja melihat perkembangan di dunia internasional. Indonesia kini tengah mengejar ketertinggalan dengan pertama-tama menerapkan mekanisme pengumpulan royalti satu pintu yang ditetapkan lewat Deklarasi Bali. Pada Deklarasi Bali, LMK yang tergabung dalam deklarasi ini berkomitmen untuk menyelenggarakan sebuah pengumpulan royalti yang berorientasi pada kesejahteraan hidup Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta. Karena selama ini royalti yang ada belum sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya secara utuh oleh Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta. Melihat potensi pendapatan royalti di Indonesia cukup besar, tetapi belum dapat seluruhnya dipungut. Pada kesempatan itu juga Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Haris berkata bahwa sebenarnya potensi pendapatan royalti dalam negeri itu Rp 300 miliar, akan tetapi yang baru bisa ditarik sejumlah Rp 70 miliar.

Royalti dari pengguna yang bersifat komersial dalam dua bentuk, yaitu lembaga manajemen kolektif untuk kepentingan

29 Ibid.

30 Ibid.

Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif untuk kepentingan Pemilik Hak Terkait. Untuk melakukan penghimpunan, kedua lembaga manajemen kolektif itu wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing lembaga manajemen kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. Kata “kelaziman” dan “keadilan” yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai penekanan pada penegakan prinsip atau asas hukum kepatutan dan prinsip atau asas hukum keadilan. Kata “lazim” menunjukkan pada ukuran- ukuran yang berlaku dalam masyarakat, misalnya tidaklah patut atau tidaklah pantas jika royalti yang didapat dari pengelolaan lembaga manajemen kolektif itu lebih banyak dinikmati oleh lembaga manajemen kolektif daripada yang dinikmati oleh para Pencipta atau Pemegang Hak Terkait. Oleh karena itu, pendistribusian dari hasil royalti yang dikelola oleh lembaga manajemen kolektif itu kepada para Pencipta atau Pemegang Hak Terkait haruslah memenuhi rasa keadilan yang kemudian tentang besarnya akan diatur oleh kementerian terkait.³¹

Dalam laman berita Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dikatakan bahwa berdasarkan catatan LMKN, perolehan royalti musik untuk hak cipta dan hak terkait mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2016. Pada tahun 2016, LMKN berhasil mengumpulkan royalti sebanyak 22 Milyar Rupiah. Selanjutnya pada tahun 2017, terjadi peningkatan pendapatan royalti musik mencapai 36 Milyar Rupiah. Kemudian pada akhir tahun 2018 pengumpulan royalti musik mencapai hingga mencapai 83% dengan pencapaian nilai pengumpulan royalti hingga mencapai 66 Milyar Rupiah. Merujuk pada kegiatan

pengumpulan royalti tersebut terlihat progres yang sangat luar biasa.

Dengan adanya Deklarasi Bali, maka dapat dipertanyakan pula apakah LMK masih memiliki wewenang dalam mengumpulkan royalti mengingat bahwa LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Dimana penarikan royalti sistem satu pintu ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan pengelolaan royalti musik yang profesional, transparan, adil dan efisien. Apabila LMK tidak ada lagi maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait, harus menjadi anggota dari LMKN.

Dalam hal pembayaran royalti musik pada aplikasi musik *streaming*, LMKN mempunyai otoritas untuk mengatur tarif yang sesuai untuk setiap lagu yang di *streaming* oleh pengguna. Namun saat ini LMKN memiliki kendala dimana belum adanya *database* semua lagu yang beredar di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada pemberian royalti yang seharusnya diterima Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. LMKN harus memulai dari *database* ini terlebih dahulu. Sehingga penyedia aplikasi musik *streaming* dapat dengan mudah memberikan setiap royalti yang dihasilkan dari pemutaran musik pada aplikasinya. Mengutip Dobusch dan Kapeller, keterbukaan distribusi musik lewat aplikasi digital menjadi pisau bermata dua bagi musisi dan pelaku bisnis musik. Teknologi ini memudahkan mereka dalam melakukan distribusi sehingga ciptaannya dikenal lebih banyak orang. Sementara di sisi lain, teknologi ini makin mengikis kemungkinan musisi mendapatkan hak ekonomi dari musik yang diputar. Fungsi ganda teknologi digital ini sering kali membuat para musisi tidak mempersoalkan berapa kali musik mereka diputar di layanan musik digital dan berapa royalti yang seharusnya mereka dapatkan, asalkan musik mereka dapat terdistribusikan.

31 Binsar P. Sihotang, “Perlindungan Hak Ekonomi Produser Fonogram Terhadap Pembajakan Musik Dan Lagu-Lagu Asing Di Indonesia.”

Pengawasan pembayaran royalti dari pencipta sendiri pun menjadi kurang maksimal. Di titik inilah *database* yang memuat data mengenai pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait menjadi penting. *Database* ini harus mampu mencatat secara otomatis pemutaran suatu ciptaan dalam aplikasi musik digital. (Sartika Nanda Lestari, "A Legal Protection of Music Royalty on Open Content License Through Soundcloud".³²

Langkah berikutnya, LMKN harus dengan segera menerbitkan peraturan tentang Tarif royalti pada aplikasi musik *streaming*. Hal ini akan berakibat dengan berapa banyak royalti yang akan dibayar setiap pemutarannya. Untuk mendapatkan data yang valid mengenai berapa banyak sebuah lagu diputar dari digital musik *streaming*, LMKN juga harus mempunyai alat pendeteksi banyaknya sebuah lagu diputar. Era digital saat ini semakin mendorong LMKN untuk terus mengembangkan sistem teknologi informasinya agar bisa mengawasi dan memberikan hak yang sepatutnya diterima oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyedia aplikasi musik *streaming* di Indonesia masih mengelola sendiri royalti yang akan diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait. Mekanisme pengelolaan royalti melalui aplikasi musik *streaming* diatur sendiri oleh pihak penyedia aplikasi musik *streaming* dengan menghitung jumlah royalti yang harus dibayarkan tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait

berdasarkan jumlah *streaming* lagu/musik yang dilakukan pengguna aplikasi. Setelah dihitung kemudian penyedia aplikasi musik *streaming* menyerahkannya melalui label rekaman dan Lembaga Manajemen Kolektif yang kemudian melakukan pendistribusian kepada pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait. Jumlah royalti yang diterima oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait belum ada standar bakunya mengenai tarif resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tarif tersebut hanya berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dengan aplikasi musik *streaming*.

Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengelola royalti musik *streaming* dilakukan dengan cara membuat database musik yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Selanjutnya LMKN dapat bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk berkolaborasi melalui proyek portomento dalam hal pengumpulan database musik Indonesia. Langkah berikutnya LMKN melakukan penerbitan aturan terkait jumlah royalti yang dapat ditarik dari aplikasi musik *streaming*. Sehingga Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dapat menerima hak ekonomi dari karyanya dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penulisan ini, maka penulis menemukan beberapa saran yang dapat dipakai untuk pemangku kepentingan diantaranya adalah:

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan LMKN dan Bekraf dalam membangun database musik Indonesia sehingga dapat melindungi hak ekonomi dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyusun peraturan perundang-undangan mengenai wewenang Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak lagi bisa melakukan

32 Sartika Nanda Lestari and Arifin Pringgo Laksono, "A Legal Protection of Music Royalty on Open Content License through Soundcloud," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 3 (2018): 329-336, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2124/616>.

penarikan penghimpunan dan pendistribusian royalti setelah disepakatinya Deklarasi Bali.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menyusun peraturan perundang-undangan tentang tarif yang sesuai untuk dipakai dalam penarikan royalti untuk musik yang diputar di aplikasi musik *streaming*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, rekan-rekan peneliti atas banyaknya masukan bagi penulis untuk terus berkarya dan menambah data yang diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Syifa. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke" 1 (2018): 713–731.
- Binsar P. Sihotang. "Perlindungan Hak Ekonomi Produser Fonogram Terhadap Pembajakan Musik Dan Lagu-Lagu Asing Di Indonesia" (2014).
- Cekaja.com. "Intip Cara Baru Musisi Mendownload Duit Di Era Digital." <https://www.cekaja.com/kartu-kredit/news/137980-intip-cara-baru-musisi-mendownload-duit-di-era-digital.html>.
- Dimiyati, Agus. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke" (n.d.): 30–43.
- Heriani, Fitri Novia. "Aplikasi Penyedia Musik Sejenis JOOX, iTunes Siap-Siap Kena Royalti." *Hukum Online*.
- It, How, Changes How, You Get, and Paid Your. "The Music Modernization Act : " (n.d.).
- Kompas. "Layanan 'Music Streaming' Sumbang 43 Persen Pendapatan Industri Musik." Last modified 2018. <https://tekno.kompas.com/read/2018/04/25/12005617/layanan-music-streaming-sumbang-43-persen-pendapatan-industri-musik?page=all>.
- Lestari, Sartika Nanda, and Arifin Pringgo Laksono. "A Legal Protection of Music Royalty on Open Content License through Soundcloud." *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 3 (2018): 329–336. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2124/616>.
- Listiyani, Dini. "Pecahkan Masalah Royalti, Spotify Pinang Startup Mediachain." *Okzone.Com*.
- Mirwansyah, Oleh. "Tinjauan Terhadap Perlindungan Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (2014).
- Netti, S Yollis Michdon, and Irwansyah Irwansyah. "Spotify: Aplikasi Music Streaming Untuk Generasi Milenial." *Jurnal Komunikasi* 10, no. 1 (2018): 1.
- Perspektif, Dalam, and H A K Asasi. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (" 1, no. 3 (2019): 69–84.
- Prof. Dr. Rahmi Janed, S.H., M.H. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahma, Athika. "Spotify Tak Lagi Izinkan Musisi Indie Upload Musik Secara Langsung." *Liputan6.Com*.
- Simatupang, Taufik H. "Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan KI Di Indonesia" 10 (2016).
- Soekanto, Soerjono; Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Spotify. "Syarat Dan Ketentuan Penggunaan Spotify."
- Suhayati, Monika. "Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28," no. 28 (2014): 207–222.
- "'Deklarasi Bali' Sepakati Pemungutan Royalti Musik Satu Pintu Jadi Lebih Tertib Dan Transparan." *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*.
- "Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/ Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu," n.d.
- "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Nomor 36 TH 2018. Pdf," 2018.
- "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," n.d.